

BAB II

PEMBAHASAN

Bab II dalam penelitian ini berfokus pada pemaparan data yang dikumpulkan penulis terkait dinamika politik domestik dan kebijakan luar negeri India di bawah dominasi Partai Bharatiya Janata (BJP) dan kepemimpinan Narendra Modi. Bab ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana praktik eksklusivisme politik, nasionalisme Hindu, dan strategi politik ultranasionalis BJP termanifestasi dalam berbagai pernyataan resmi, cuitan media sosial, pemberitaan, serta kebijakan-kebijakan aktual yang dijalankan selama periode pemerintahan Modi. Dengan pendekatan deskriptif, bagian ini menyusun data-data kunci secara sistematis untuk kemudian dianalisis lebih lanjut pada bab selanjutnya. Secara struktur, pembahasan dalam bab ini terbagi ke dalam empat bagian utama. Pertama, dinamika politik domestik India di bawah kepemimpinan BJP, termasuk pergeseran nilai dari pluralisme menuju eksklusivisme berbasis identitas mayoritas. Kedua, eksklusivisme politik dan nasionalisme Hindu yang dibentuk melalui sejarah Hindutva dan narasi-narasi eksklusif politik anggota BJP. Ketiga, kepemimpinan Modi sebagai figur karismatik dan strategi mobilisasi massa melalui media serta kampanye digital. Keempat, dinamika hubungan luar negeri India dengan negara-negara tetangga seperti Pakistan, Bangladesh, dan Tiongkok, yang menunjukkan perubahan pendekatan diplomatik India sejak Modi berkuasa. Bab ini menyajikan gambaran awal atas pola-pola kebijakan dan narasi yang membentuk arah politik dan diplomasi India kontemporer.

2.1. Dinamika Politik India di Bawah Kepemimpinan Partai Bharatiya

Janata

2.1.1. Perubahan Status Quo dari Politik Pluralisme ke Politik Eksklusif

India sebagai negara federasi dengan 28 negara bagian dan 8 wilayah persatuan, memiliki populasi mencapai 1.4 miliar jiwa. Menjadi sebuah negara federasi dengan keberagaman latar belakang dan budaya, tentunya India juga menjadi rumah dari berbagai agama. Dengan Hindu sebagai mayoritas di angka 79% dari total populasi India, Muslim sebagai agama terbesar kedua di angka 15%, 2% populasi agama Kristen, dan agama Buddha, Sikh, dan Jain sebagai sebagian populasi kecil lainnya sebagaimana yang telah penulis paparkan di latar belakang. India yang merupakan negara heterogen, mencapai titik puncak pluralisme politiknya di bawah kepemimpinan Jawaharlal Nehru sebagai Perdana Menteri pertama India. Nehru berusaha untuk membangun fondasi negara India yang sekuler dan inklusif, dimana berbagai kelompok agama, etnis, dan bahasa dapat hidup berdampingan dalam satu kesatuan politik di bawah sistem negara federal (Nehru, 1946). Lebih lanjut, konstitusi India yang mulai berlaku di tahun 1950 turut menegaskan sekularisme sebagai prinsip dasar negara, menjamin adanya kebebasan dalam memeluk agama apapun serta melarang diskriminasi berbasis agama dan kasta (Ambedkar, 1950). Dengan sistem tersebut, komunitas Muslim, Sikh, Kristen, dan Hindu memiliki perlindungan hukum yang kuat dan setara dalam struktur negara demokratis di India pada masa tersebut.

Nehru merupakan pelopor dari konsep "*Unity in Diversity*" yang kemudian menjadi cikal bakal periode India dengan identitas nasional yang pluralis selama 17 tahun kepemimpinannya (Anderson, 2003). Kebijakan-kebijakan Nehru selalu berfokus pada inklusivitas tanpa memandang agama guna menjaga keberagaman masyarakat India, salah satu contohnya adalah

kebijakan sosial, pemerintah India di bawah Nehru menerapkan sistem kuota bagi kelompok marginal seperti kaum Dalit dan minoritas agama dalam pendidikan serta pekerjaan (Jaffrelot, 1997). Selain itu, Nehru dan Kongres selalu terbuka pada strategi-strategi politik yang dapat mendukung adanya integrasi. Salah satu contohnya adalah pada saat Nehru dan Kongres yang semula bersikeras untuk menetapkan negara-negara bagian di India berdasarkan garis wilayah pada masa India Britania, pada akhirnya merubah kebijakan ini setelah mendengar penolakan rakyat yang justru mengancam adanya separatisme. Kongres kemudian merubah mekanisme pembagian negara-negara bagian di tahun 1956, dimana pembagian negara bagian kemudian didasari oleh garis etnolinguistik yang membiarkan masing-masing negara bagian menggunakan bahasanya sendiri dalam pemerintahan dan menarik kembali kebijakan yang mengatur bahasa Hindi sebagai bahasa nasional (Bethany, 2014). Kemudian, bahasa Inggris secara efektif dijadikan sebagai *lingua franca* yang digunakan sebagai bahasa nasional (Girvin, 2020). Kebijakan inilah yang kemudian juga kerap disebut sebagai sistem etno-federalisme yang berhasil dalam mengintegrasikan kelompok-kelompok masyarakat yang heterogen di India 20 tahun pasca kemerdekaan. Dalam kurun waktu tersebut, sekitar 80-90% penduduk menganggap diri mereka bukan hanya sebagai warga negara India, tetapi juga sebagai sesama anak bangsa (Adeney & Marie, 2005). Strategi akomodasi politik dalam kerangka nasionalisme pan-India berhasil menjadi dasar politik untuk kompromi dalam berbagai kasus gerakan-gerakan separatisme, dimana dalam praktik etno-federalisme, pemerintah India di bawah Nehru dan Kongres memberikan ruang dan kesempatan kepada sebagian besar kelompok bahasa dan etnis di India untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat daripada bersaing melalui separatisme yang bersifat *zero-sum*

game (Girvin, 2020).

Meskipun sistem etno-federalisme sempat berhasil di masa awal pelaksanaannya, seiring berjalannya waktu, beberapa konflik separatis lain ternyata gagal untuk diselesaikan, khususnya perpecahan yang berakar pada identitas kebangsaan dan agama (Giovanni, et al., 2012). Terdapat paradoks antara keberhasilan dan kegagalan yang kemudian memunculkan kebutuhan bahwa sebuah negara federasi membutuhkan satu etnisitas yang dominan (*Staatsvolk*) jika berkaca pada teori Brendan O’Leary (Brendan, 2001). Hal inilah yang kemudian mendukung adanya perubahan arah politik India dari yang semula bersifat inklusif, hingga menjadi eksklusif di era modern. Ekspresi politik dari *Staatsvolk* atau *meta-ethnicity* berwujud menjadi demokrasi-etnis, yang kemudian digunakan oleh Katharine Adeney (2017) dalam artikelnya yang berjudul “*Does Ethnofederalism Explain the Success of Indian Federalism?*” untuk menunjukkan bahwa dinamika meta-ethnicity tersebut terjadi di India. Sebagian besar negara bagian India memiliki bahasa, agama, dan etnis yang dominan, dan dalam negara bagian yang lebih stabil, jumlah kelompok bahasa dan agama kurang dari dua. Sedangkan, dalam negara-negara bagian yang lebih heterogen seperti Nagaland, Manipur, dan Kashmir yang lebih rentan terhadap konflik, menunjukkan bahwa dominasi satu kelompok dalam batas tertentu diperlukan untuk menjaga stabilitas wilayah. Konflik-konflik pada masa itu kerap terjadi di negara-negara bagian dan wilayah dimana etnis ‘Hindu’ tidak dominan. Sehingga, budaya bersama yakni Hinduisme, terus menjadi faktor yang turut memfasilitasi kompromi (Adeney, 2017).

Perubahan arah politik India dari yang semula pluralis atau inklusif menjadi politik eksklusif secara signifikan dipengaruhi oleh keberadaan BJP,

meskipun BJP baru didirikan pada tahun 1980. Karena, partai ini merupakan bagian dari jaringan organisasi Hindu yang lebih luas, yang dikenal sebagai Sangh Parivar atau “keluarga organisasi”. Salah satu organisasi dalam Sangh Parivar yang berpengaruh adalah Rashtriya Swayemsevak Sangh (RSS) yang telah berdiri sejak 1925, yang turut memengaruhi kebijakan-kebijakan politik dalam pemerintah India pada saat itu (Anderson, 2003). Hingga saat ini, sebagian besar kepemimpinan BJP berasal dari lingkungan RSS. BJP kemudian memanfaatkan kondisi dimana beberapa konflik berbasis agama dan budaya sulit untuk diselesaikan sebagai alasan meraih simpati dari masyarakat India secara luas, dimana wajah mayoritarianisme Hindu menjadi dibutuhkan di konflik-konflik separatisme yang kian menantang (Noorant, 2011).

Kebijakan-kebijakan BJP yang kian memperkuat eksklusivisme politik di India adalah saat RSS dan BJP mengorganisir kampanye untuk membangun kuil Ram di Ayodhya serta keberadaan Pasal 25 Konstitusi India yang mengklasifikasikan umat Buddha, Sikh, dan Jain sebagai Hindu dalam hukum agama, meskipun klasifikasi ini sering kali ditolak oleh komunitas agama tersebut (Savarkar (1969); Jaffrelot (2007)). Kebijakan lainnya adalah masalah pelarangan konversi dari agama Hindu ke agama lain, pencabutan status khusus Jammu dan Kashmir, dan kritik keras BJP terhadap Kongres yang dinilai terlalu berpihak pada kepentingan minoritas yang kemudian disebut dengan istilah *minorityism* (Choudhary, 1994). Kemudian, di tahun 1990, terdapat kampanye Ayodhya yang diprakarsai oleh L. K. Advani selaku Presiden BJP guna memobilisasi massa melalui Ram Rath Yatra. Gerakan ini mengadopsi simbolisme Hindu sebagai representasi bangsa yang kemudian berujung pada penghancuran Masjid Ayodhya pada tahun 1992. Selebihnya, BJP dalam praktik politik dan upayanya

mendapatkan simpati masyarakat seringkali mengaburkan batas antara sejarah Hindu dan sejarah India, yang diungkapkan Advani di tahun 1989:

“Mungkin ini adalah sejarah Hindu, tetapi ini adalah sejarah India, budaya India, dan warisan India.”

Pernyataan tersebut terus menggema dalam publikasi partai, termasuk manifesto dari para pemilihnya yang menyatakan bahwa BJP berkomitmen pada konsep “Satu Bangsa, Satu Rakyat, dan Satu Budaya” (Varshney, 1993). Eksklusivisme politik berbasis agama Hindu oleh BJP kemudian berlanjut hingga saat ini dan semakin mengakar dengan kehadiran Narendra Modi sebagai Perdana Menteri ke-15 India.

Kenaikan BJP ke tampuk kekuasaan nasional di India yang memanfaatkan narasi dan strategi politik eksklusif juga turut menjadi faktor perubahan politik India di era kontemporer. Di bawah kepemimpinan Narendra Modi, BJP memperoleh 282 dari 543 kursi di Lok Sabha, badan representatif India. Hal tersebut menjadikan BJP partai pertama dalam tiga dekade terakhir yang memenangkan mayoritas absolut tanpa koalisi (Jaffrelot, 2015). Kemenangan ini bukan hanya bersifat elektoral, melainkan juga ideologis. BJP berhasil memadukan retorika pembangunan ekonomi dengan narasi identitas Hindu yang kuat, yang menjadi daya tarik bagi kelompok mayoritas (Palshikar, 2015). Kemenangan tersebut berlanjut pada pemilu 2019, di mana BJP bahkan berhasil meningkatkan dominasinya dengan perolehan 303 kursi yang turut memperkuat posisinya sebagai kekuatan hegemonik dalam parlemen India (Vaishnav, 2019).

Lok Sabha, atau Majelis Rendah dari Parlemen India, merupakan

lembaga legislatif utama dalam sistem demokrasi parlementer India. Anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu setiap lima tahun, dan badan ini memiliki kekuasaan legislatif yang luas, termasuk dalam membentuk undang-undang, menyetujui anggaran negara, dan memberikan suara kepercayaan atau mosi tidak percaya terhadap pemerintah. Karena pemerintahan nasional dibentuk oleh partai atau koalisi yang memiliki mayoritas suara di Lok Sabha, maka kontrol atas lembaga ini sangat menentukan arah kebijakan negara. Zoya Hasan (2018) menjelaskan bawah dominasi di Lok Sabha memungkinkan partai yang berkuasa untuk menentukan agenda-agenda legislatif, memarginalkan suara oposisi, dan melakukan sentralisasi kekuatan di sekitar Perdana Menteri”. Sehingga, kemenangan BJP di Lok Sabha telah memungkinkan partai tersebut dalam mendorong sejumlah undang-undang yang turut mendukung agenda politik yang eksklusif, menyingkirkan politik sekuler oleh Kongres India.

2.2. Eksklusivisme Politik dan Nasionalisme Hindu

2.2.1. Sejarah Hindutva dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan BJP

Jika berbicara mengenai Partai Bharatiya Janata (BJP) sebagai partai dengan ideologi Hindutva yang berkuasa di India saat ini, maka kita tidak dapat melupakan Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) yang merupakan organisasi non-politik yang memiliki pengaruh terhadap gerakan politik BJP. Meskipun BJP baru dibentuk pada tahun 1980, akar sejarah partai ini berasal dari Bharatiya Jana Sangh (BJS) yang terbentuk di tahun 1951 dan merupakan sayap politik dari Sangh Parivar atau ‘keluarga’ organisasi yang dibentuk di sekitar RSS (Walker, 2011). RSS sendiri didirikan pada tahun 1925 dan menjadi organisasi yang memprakarsai perkembangan dari gelombang baru nasionalisme politik. RSS

didirikan oleh umat Hindu kelas menengah dengan misi utama melatih pemuda Hindu untuk menahan godaan masyarakat sekuler dan menghidupkan kembali nilai-nilai tradisional Hindu, yang merupakan esensi dari Hindutva itu sendiri (Dennis, 1994). Secara resmi, filosofi BJP dan BJS didasarkan pada konsep humanisme integral sebagaimana yang disampaikan pertama kali oleh Pandit Deendayal Upadhyaya yang merupakan anggota RSS dan JS di Bombay pada April 1965, dimana ia berpendapat bahwa “Kemerdekaan sebuah bangsa berkaitan erat dengan budaya. Jika budaya tidak menjadi dasar kemerdekaan, maka gerakan politik untuk kemerdekaan hanya akan menjadi perebutan kekuasaan oleh individu-individu egois dan haus kekuasaan. Bahwa kemerdekaan hanya akan bermakna jika menjadi instrumen untuk mengekspresikan budaya kita.” (Hinnells & King, 2007). Konsep ini selaras dengan ideologi nasionalisme Hindu yang telah berkembang, yang dikenal dengan sebutan “Hindutva”.

Perkembangan Hindutva sendiri diprakarsai oleh Savarkar melalui tulisannya yang berjudul ‘*Hindutva/Who is a Hindu?*’ pada tahun 1923. Dalam tulisannya tersebut, Savarkar pun kemudian menjawab pertanyaan ‘siapaakah seorang Hindu’, yakni siapapun yang menganggap bahwa India merupakan ‘tanah leluhur’ (*father land*) atau ‘tanah suci’-nya (Savarkar, 1923). Savarkar tidak mendefinisikan ke-Hinduan ke dalam kategori agama, melainkan sebagai identitas etno-kultural dan geopolitik. Savarkar memisahkan Hindutva dan Hindu sebagai kepercayaan, dan lebih menekankan pada kesamaan rasial, bahasa, sejarah, serta keterikatan terhadap tanah air India. Dengan demikian, Hindutva adalah proyek identitas nasional yang eksklusif, yang secara aktif mengecualikan komunitas Muslim dan Kristen dari narasi kebangsaan India. Hindutva kemudian dirumuskan menjadi ideologi politik yang menggabungkan nasionalisme dengan

identitas etno-religius yang menggabungkan budaya dan ras (Savarkar, 1989). Dalam pidatonya kepada Mahasabha Hindu di Nagpur pada tahun 1938, Savarkar menekankan bahwa “India harus menjadi tanah yang disediakan untuk para Hindu” dan kelompok lain yang berada di India hanyalah karena toleransi dan tidak dianggap sebagai warga negara yang utuh (Heredia, 2009). Sehingga, sedari awal, konsep nasionalisme hindu dikembangkan untuk memobilisasi para Hindu ke dalam kelompok etnis yang dipolitisasi, serta untuk membentuk kelompok etnis tersebut sebagai kelompok mayoritas yang dominan, dan non-Hindu dianggap sebagai kelompok minoritas subordinat. Paham ini kemudian dibentuk oleh BJP di kemudian hari untuk menyatukan dan memobilisasi kelas-kelas dan kasta-kasta yang tidak setara di antara para ‘Hindu’ di bawah satu payung politik (Heredia, 2009).

Hindutva kemudian berkembang menjadi sebuah filosofi politik di bawah Madhavrao Sadashivrao Golwalkar, yakni ketua RSS kedua. Pemikiran Hindutva dikembangkan oleh Golwalkar dan RSS dengan membayangkan masa depan India di mana umat Hindu dapat merebut kembali dominasi mereka dalam masyarakat, yang diduga hilang selama periode kekuasaan Mughal dan Inggris (Chakraborty, 2019). RSS menyatakan bahwa Sangh yang ideal adalah membawa bangsa India (Hindu) ke puncak kejayaan, melalui pengorganisasian seluruh masyarakat dan memastikan perlindungan Hindu Dharma (Harriss, 2015). Konsep tersebut kemudian dituangkan oleh RSS ke dalam praktik politik BJP yang kemudian semakin dikembangkan oleh BJP di kemudian hari. Dalam situs resmi BJP, diterangkan bahwa Hindutva didasarkan pada gagasan etnis tentang menjadi seorang Hindu, dimana Hindutva atau Nasionalisme Kultural mewakili konsep BJP tentang kebangsaan India” (Anna, 2003).

Sejak berdirinya BJP di tahun 1980, partai ini terus bertransformasi dari kekuatan oposisi marginal menjadi aktor dominan dalam politik nasional India. Ditunjukkan melalui peristiwa-peristiwa penting seperti gerakan Ram Janmabhoomi dan penghancuran Masjid Babri pada tahun 1992 menandai titik balik dalam normalisasi Hindutva sebagai proyek politik yang sah (Harriss, 2015). Meskipun demikian, Hindutva dibentuk oleh BJP sebagai nasionalisme Hindu yang mereka kemas secara halus, akan tetapi dapat tetap menjadi ideologi yang mendorong ekstremis Hindu untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap kelompok lain yang meskipun secara kewarganegaraan tetap orang India, akan tetapi bukan Hindu. Konsep nasionalisme hindu ini menjadi puncak dari mentalitas “*us vs. them*” yang dapat menyulut kekerasan antara Hindu dan kelompok etnis maupun agama lain, terutama Muslim (Walker, 2011).

Paham serta tuntutan Hindutva untuk membawa bangsa Hindu ke puncak kejayaan dan memastikan perlindungan budaya Hindu sebagai budaya India kian terwujud dalam beberapa kebijakan oleh BJP di era Narendra Modi pasca terpilihnya di tahun 2014. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah penerapan *Citizenship Amendment Act* (2019) yang memberikan jalur kewarganegaraan kepada imigran non-Muslim dari negara tetangga, serta upaya membangun kembali narasi sejarah India dengan menonjolkan supremasi Hindu dan meminimalkan kontribusi komunitas non-Hindu. BJP juga merubah status khusus Kashmir sebagai satu-satunya negara bagian di India dengan mayoritas muslim dalam Uni India berdasarkan pasal 370 Konstitusi India. Selain itu, penyelesaian pembangunan kuil Hindu di lokasi bekas masjid Babri di Ayodhya Uttar Pradesh, yang sebelumnya dihancurkan oleh aktivis dari Sangh Parivar pada tahun 1992 (Harriss, 2015). Kebijakan-kebijakan oleh BJP tersebut menunjukkan bagaimana

ideologi Hindutva di bawah kepemimpinan Narendra Modi telah memengaruhi arah kebijakan domestik India yang semakin mengagungkan satu kelompok mayoritas, dan mengesampingkan bahkan mendiskriminasi kelompok-kelompok lain yang dianggap “*others*”.

2.2.2. Narasi Eksklusivisme Politik oleh Anggota-Anggota BJP

Memahami lanskap ideologis politik di India saat ini menuntut keterlibatan kritis terhadap narasi-narasi eksklusif dan keberadaan yang dibangun oleh para anggota BJP. Sebagai kekuatan politik dominan di India selama satu dekade terakhir, retorika dan kebijakan BJP tidak hanya mencerminkan tetapi juga secara aktif membentuk batasan-batasan identitas nasional, kewarganegaraan, dan hierarki sosial-budaya. Inti dari proyek politik BJP selama ini adalah penggunaan narasi-narasi eksklusif sebagai konstruksi wacana yang turut mendefinisikan siapa yang dianggap sebagai bagian dari bangsa India yang dibayangkan, dan siapa yang akan tetap berada di luar batas tersebut sebagai “*others*”. Mengangkat persoalan narasi-narasi eksklusivitas yang dinyatakan oleh para anggota BJP merupakan langkah penting dalam memahami konsolidasi hegemoni etnonasionalis mayoritarian yang secara perlahan menggeser fondasi sekuler dan pluralistik India di bawah Nehru hingga saat ini, di bawah kekuasaan BJP.

Untuk memahami lebih lanjut bagaimana wacana eksklusivitas bekerja dalam praktik politik BJP, penting untuk menelaah sejumlah pernyataan publik oleh tokoh-tokoh partai tersebut yang secara eksplisit atau implisit menandai komunitas tertentu sebagai “*others*” dalam narasi kebangsaan India.

“Budaya Hindu adalah napas kehidupan Hindustan. Oleh karena itu,

jelas bahwa jika Hindustan ingin dilindungi, kita harus terlebih dahulu memelihara budaya Hindu. Jika budaya Hindu musnah di Hindustan itu sendiri, dan jika masyarakat Hindu tidak lagi ada, maka tidak akan pantas untuk menyebut entitas geografis yang tersisa sebagai Hindustan....”

Berikut adalah narasi yang dipercaya dan dijunjung tinggi oleh BJP dan RSS, di mana mereka meyakini bahwa tugasnya adalah untuk melindungi masyarakat Hindu untuk menjaga keutuhan India. Narasi tersebut kian dibawa hingga saat ini, di mana BJP memanfaatkan narasi-narasi tersebut untuk menjaring simpatisan mayoritas Hindu yang kemudian akan memilih mereka di Lok Sabha. Sepanjang proses mencari pendukung melalui berbagai kampanye, BJP dan Modi dianggap selalu mengeluarkan pernyataan dan narasi-narasi yang eksklusif kepada umat Hindu, bahkan cenderung diskriminatif terhadap umat Muslim di India (Human Rights Watch, 2024). Menurut *Human Rights Watch*, dalam kampanye-kampanye Modi di tahun 2024 menjelang pemilihan Lok Sabha, pernyataan dan narasi yang dibangun di dalam kampanyenya seringkali berisi kebencian terhadap Muslim dan kelompok-kelompok minoritas lain, hal ini kemudian disinyalir memiliki hubungan dengan meningkatnya penyerangan terhadap kelompok-kelompok minoritas tersebut oleh para kelompok simpatisan Modi yang tidak bertanggung jawab. Dalam kampanye-kampanyenya, Modi seringkali membawa-bawa oposisinya dari Kongres, dan menyatakan bahwa jika Kongres memenangkan pemilihan umum, maka masyarakat Hindu akan dapat terancam oleh kelompok-kelompok lain. Contohnya adalah kampanye-kampanye Modi yang telah dianalisis dan dicatat oleh *Human Rights Watch* di Mahbubnagar di

Telangana, Dhar di Madhya Pradesh, Koderma di Jharkhand, dan Dumka di Jharkhand pada 2024 silam (Human Rights Watch, 2024). Dalam kampanyenya di Mahbubnagar, Telangana pada 10 Mei 2024, ia menyatakan,

“Kongres ingin menjadikan umat Hindu sebagai warga negara kelas dua di negara mereka sendiri. Apakah ini alasan mereka menyerukan jihad suara?”

Dalam kampanyenya di Dhar, Madhya Pradesh pada 7 Mei 2024, ia menyatakan,

“Jika Kongres berhasil, mereka akan mengatakan bahwa hak pertama untuk tinggal di India adalah milik bank suara mereka [Muslim]. ... Kongres akan memberikan kuota bahkan dalam kontrak pemerintah berdasarkan agama.”

Dalam kampanyenya di Koderma, Jharkhand pada 14 Mei 2024, ia menyatakan,

“Sulit untuk menjalankan kepercayaan kami di Jharkhand saat ini. Berhala-berhala dewa kami dihancurkan. Para penyusup dengan pola pikir jihadi bersekongkol dan menyerang, tetapi pemerintah Jharkhand justru menutup mata dan diam-diam mendukung mereka. Para penyusup ini telah mengancam keamanan saudara-saudari dan putri-putri kami.”

Selain di Jharkhand, Modi kerap menyebut kelompok muslim di India sebagai penyusup, sebagaimana yang tersurat dalam pidatonya di Rajasthan, ia menyatakan,

"Dulu, saat mereka berkuasa, mereka mengatakan Muslim memiliki hak pertama atas kekayaan bangsa... Apakah uang hasil jerih payah Anda seharusnya diberikan kepada para penyusup?"

Terakhir, dalam kampanyenya di Dumka, Jharkhand pada 28 Mei 2024, ia menyatakan,

"Di banyak daerah saat ini, populasi Adivasi [Masyarakat Adat] menurun dengan cepat, sementara jumlah penyusup semakin meningkat. Apakah para penyusup itu tidak menduduki tanah Adivasi? Apakah putri-putri Adivasi kita tidak menjadi target para penyusup? Keamanan putri-putri kita terancam, bukan? Hidup mereka dalam bahaya, mereka dibunuh, seorang putri Adivasi dibakar hidup-hidup, putri Adivasi lainnya suaranya dibungkam. Siapa sebenarnya orang-orang yang menargetkan putri-putri Adivasi ini?"

Selain Modi, *Human Rights Watch* mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin BJP lain seperti Menteri Dalam Negeri India Amit Shah, Perdana Menteri Uttar Pradesh Adityanath, Perdana Menteri Assam Himanta Biswa Sarma, dan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Anurag Thakur, juga turut menyampaikan pidato-pidato yang mengadu domba masyarakat Hindu dengan Muslim, menyulut kebencian dan perasaan gelisah dan tidak aman di antara populasi Hindu (*Human Rights Watch*, 2024). Dalam pidatonya, Amit Shah menyatakan dukungan penuh terhadap Citizenship Amendment Act (CAA) di India, dalam pidatonya tersebut ia juga menyatakan imigran muslim adalah 'rayap' dan menegaskan bahwa hukum tersebut sepenuhnya berpihak terhadap

Hindu, Buddha, dan Sikh (Poonam, 2019).

Tidak hanya dalam pidato, BJP beberapa kali mempublikasi video-video palsu guna menyebarkan disinformasi dan memfitnah Muslim. Bahkan, video-video tersebut dipublikasikan melalui akun resmi BJP di Instagram, sebagaimana yang terjadi pada 30 April 2024 dan 4 Mei 2024. Kedua video tersebut berisi kebohongan bahwa Partai Kongres mendukung masyarakat Muslim untuk menyusup ke dalam India dan mencuri kekayaan India, “Manifesto Partai Kongres tidak lain adalah ideologi Liga Muslim [Pakistan] yang terselubung. Jika Anda bukan Muslim, Kongres akan merampas kekayaan Anda dan membagikannya kepada Muslim. Narendra Modi mengetahui rencana jahat ini. Hanya dia yang memiliki kekuatan untuk menghentikannya.” (Human Rights Watch, 2024).

Paparan narasi dalam subbab ini menunjukkan bagaimana narasi eksklusivisme yang dibangun oleh para elit BJP, termasuk Narendra Modi sebagai Perdana Menteri bukan hanya sekadar retorika politik yang sporadis, melainkan bagian dari strategi ideologi Hindutva yang sistematis. Melalui penggunaan simbol-simbol keagamaan Hindu dalam ruang publik dan institusi negara, serta diksi-diksi yang secara eksplisit maupun implisit mendiskreditkan kelompok minoritas, BJP telah berhasil menggeser diskursus politik nasional menuju arah yang semakin homogen dan eksklusif. Retorika seperti penyebutan umat Muslim sebagai “penyusup”, penekanan pada hak istimewa kelompok mayoritas atas sumber daya negara, serta dukungan terhadap proyek-proyek keagamaan seperti pembangunan kuil Ram di Ayodhya, merepresentasikan upaya untuk memonopoli identitas nasional berdasarkan garis religiusitas Hindu. Narasi-narasi ini kemudian tidak hanya mengaburkan batas antara agama Hindu dan negara, tetapi

juga mereduksi prinsip kemajemukan yang telah lama menjadi fondasi konstitusional India. Dalam konteks inilah, politik di bawah kepemimpinan Modi tidak lagi sekadar menampilkan representasi mayoritas, tetapi juga membentuk ulang makna kewarganegaraan dan keanggotaan dalam komunitas politik India. Ketika eksistensi dan ekspresi kelompok minoritas dipandang sebagai pengurangan dari identitas nasional yang “autentik”, maka proses demokratisasi pun turut tereduksi menjadi alat konsolidasi kekuasaan berbasis identitas politik eksklusif. Proses ini menghasilkan sebuah bentuk politik yang intoleran secara simbolik dan eksklusif dalam implementasi kebijakan dan representasi institusional oleh BJP sebagai partai yang berkuasa dan Modi sebagai pemimpin saat ini.

2.3. Kepemimpinan BJP dan Mobilisasi Massa

Narasi eksklusivisme yang diproduksi dan direproduksi oleh BJP dan Modi tidak dapat dipisahkan dari strategi politik yang lebih luas yang digunakan untuk mengonsolidasi dukungan publik secara masif. Eksklusivisme identitas Hindu yang dibangun di ruang wacana publik hanya akan efektif ketika berhasil diterjemahkan ke dalam praktik mobilisasi politik yang mampu menjangkau dan memengaruhi basis massa secara luas. Dalam konteks ini, pemerintahan BJP di bawah Narendra Modi tidak hanya menghadirkan visi ideologis yang homogen, tetapi juga mengembangkan mekanisme mobilisasi yang terstruktur dan efisien, dengan memanfaatkan figur Modi sebagai pemimpin rakyat (*people's leader*) yang kharismatik, dominasi dalam lanskap media massa, serta inovasi-inovasi tertentu dalam strategi kampanye politiknya. Bab ini secara spesifik akan membahas bagaimana rezim BJP memanfaatkan elemen-elemen tersebut untuk

membangun loyalitas elektoral, memperluas jaringan dukungan, dan menanamkan narasi hegemonik dalam kesadaran kolektif masyarakat India.

2.3.1. Narendra Modi dan Citra ‘Pemimpin Rakyat’

Keberhasilan BJP dan Modi dalam mendapatkan banyak pendukung hingga akhirnya meraih kemenangan politik pada tahun 2014 tidak lepas dari penggambaran citra Narendra Modi sebagai seorang pemimpin rakyat yang mengayomi dan kharismatik di mata masyarakat luas. Citra Modi sebagai pemimpin rakyat yang karismatik tersebut dibangun melalui gabungan antara gaya komunikasi personal, narasi biografis yang membumi, serta penggunaan media yang strategis. Menurut teori kharisma Weber, kepemimpinan karismatik tidak hanya bergantung pada posisi formal dalam struktur kekuasaan, tetapi juga pada persepsi masyarakat terhadap kualitas luar biasa sang pemimpin yang seringkali dianggap memiliki kekuatan supramanusia dan kemampuannya dalam membangun ikatan emosional dengan pengikutnya. Modi berhasil membangun kesan sebagai pemimpin yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat dengan selalu mengangkat latar belakangnya sebagai penjual teh (chaiwala), yang berhasil menembus elit politik nasional tanpa dukungan dari dinasti politik manapun (Sharma & Thakur, 2021). Berkembangnya citra Modi sebagai pemimpin rakyat adalah fenomena yang kemudian disebut sebagai “gelombang Modi”, fenomena ini memanfaatkan imajinasi publik dalam mengangkat Narendra Modi ke dalam cerita rakyat politik India yang dipercaya secara luas. Penayangan kampanye elektoral yang menampilkan Modi sebagai pemimpin kuat yang mampu menyelesaikan berbagai krisis yang melanda India, membentuk figur pribadi yang menjulang tinggi dan mengubah spektrum politik serta ideologis negara India (Rai, 2019).

Gelombang Modi sendiri muncul setelah pengangkatan Modi sebagai Ketua Menteri Gujarat pada tahun 2001. Hal tersebut turut membawa BJP meraih kemenangan dalam pemilu negara bagian tahun 2002 dan memulai proses justifikasi kemenangan politik BJP. Modi turut mengimplementasikan komitmen ideologi RSS untuk menantang konsep India sebagai bangsa inklusif dengan memproyeksikan budaya Hindu sebagai dasar-dasar utama negara India, termasuk proyeksi panduan ritual, norma sosial, festival keagamaan, praktik sosial, dan mitologi yang berasal dari teks-teks Hindu kuno (Rai, 2023). Di balik kharisma Modi sebagai pemimpin, terdapat beberapa kebijakan ekonomi yang berhasil yang kemudian dimanfaatkannya untuk melegitimasi citranya dan BJP secara multidimensional. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan narasi pertumbuhan Gujarat yang didukung oleh adanya kebijakan bernama *Gujarat Model of Development*, dengan kebijakan tersebut, Gujarat berhasil dalam meningkatkan infrastruktur dan ekonominya secara keseluruhan dengan adanya penyederhanaan aturan tata kelola, intervensi negara yang minimal untuk memfasilitasi kemudahan berbisnis, dan pemberian subsidi pemerintah untuk menarik perusahaan-perusahaan besar. Keberhasilan tersebut menjadi bukti empiris yang semakin memberikan ruang atas pembenaran politik Modi dan mengubah posisinya dari sekadar pemimpin Hindutva menjadi tokoh karismatik (Rai, 2023).

Pada dasarnya, Gelombang Modi memang merupakan manifestasi dari kepemimpinan karismatik yang turut diperoleh melalui politik spiritual-politis dan tata kelola yang berpusat pada rakyat. Karisma Modi semakin diperkuat dengan adanya kaitan dengan tata kelola pemerintahan yang secara garis besar dianggap berhasil. Perkembangan citra kepribadian Modi didukung oleh tiga hal

utama. Pertama, antara tahun 2004 hingga 2014, Modi sempat berada di bawah sorotan publik yang tajam di bawah pemerintahan *United Progressive Alliance* (UPA), namun ia berhasil menghadapi berbagai tuduhan meski harus menghadapi sejumlah proses peradilan. Hal tersebut kemudian mendorong terciptanya viktimisasi Modi yang turut memicu gelombang empati masyarakat India secara luas karena publik menilai para pemimpin UPA korup dan mempertahankan kekuasaan dengan cara yang tidak adil (Rai, 2023). Kedua, latar belakang sosial yang dimiliki oleh Modi mendukung penciptaan citra ini karena ia berasal dari keluarga biasa, tanpa adanya garis keturunan maupun kekayaan, di mana ia tidak berasal dari kalangan elit sosial dan tidak berbicara dalam gaya elit yang menguasai bahasa Inggris, hal ini nyatanya menimbulkan efek emosional berupa rasa kedekatan dan empati yang bertumbuh di benak masyarakat. Ketiga, perjalanan politik Modi sebagai pemimpin menunjukkan bahwa sepak terjang politiknya dimulai sebagai seorang propagandis biasa yang membentuk perspektif ideologinya sendiri. Hal tersebut dinilai bertolak belakang dengan mayoritas pemimpin di India yang memulai karirnya sebagai seorang pragmatis yang haus akan kekuasaan lebih besar dan menyalahgunakannya untuk kekayaan sendiri dan untuk membangun dinasti politik, komparasi tersebut memunculkan kekaguman emosional yang kuat terhadap integritas kepemimpinan Modi (Suri, 2021).

Modi kemudian hadir sebagai pemimpin yang menawarkan kesatuan dan perkembangan India secara simbolik dan sumber sanksi normatif dari adanya elit-elit politik India yang korup. Modi kemudian menjadi tolok ukur dari definisi etnis baru yang memberikan solidaritas intim dan kenyamanan psikologis bagi warga negara India (Rai, 2023). Riwayat dan latar belakang sosio-ekonominya yang sederhana, kedekatannya dengan warga yang aspiratif, serta rekam jejak tata

kelola pemerintahannya yang baik kian menjadikan Modi sebagai salah satu pemimpin yang diidolakan oleh masyarakat India kontemporer.

2.3.2. Peran Media dan Strategi Kampanye dalam Memperkuat Dukungan Masyarakat terhadap BJP

Dalam menyebarkan narasi dirinya sebagai seorang pemimpin rakyat, Modi memanfaatkan media dalam prosesnya. Salah satu instrumen utama yang ia manfaatkan adalah program radio bulanan “*Mann Ki Baat*”, di mana Modi berbicara langsung kepada masyarakat India tanpa perantara media atau partai. Program ini tidak hanya berperan sebagai sarana komunikasi satu arah, tetapi juga dimanfaatkan Modi untuk menggambarkan kedekatannya dengan rakyat, seolah-olah Modi mendengarkan dan berbicara sebagai bagian dari komunitas, bukan sebagai seorang elit politik yang jauh dari realitas sosial masyarakat (Sharma, 2021). Modi juga memanfaatkan infrastruktur media, baik konvensional maupun digital untuk mempertahankan dan memperluas pengaruhnya secara visual dan simbolik. Penelusuran terhadap penggunaan wajah Modi di berbagai kampanye dan dokumen pemerintah, seperti sertifikat vaksin COVID-19, memperlihatkan bagaimana representasi visual dimanfaatkan oleh pemerintah BJP dan Modi untuk menciptakan narasi kehadiran yang konstan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat (Pandey, 2021).

Lebih lanjut, BJP di bawah kepemimpinan Narendra Modi secara strategis memanfaatkan media untuk mengonsolidasikan kekuatan politik dan membentuk narasi yang berbasis massa dan mampu menjangkau berbagai segmen pemilih di India. Strategi komunikasi Modi ditandai oleh perpaduan ideologi tradisional Hindutva dengan teknik pemasaran politik modern, terutama melalui media massa dan platform digital. Para akademisi berpendapat bahwa

penggunaan media yang canggih oleh BJP memungkinkan mereka membingkai agenda pemerintah dalam cara yang secara budaya memiliki keterkaitan emosional yang menggugah, sehingga berhasil memobilisasi pemilih lintas kasta dan kelas (Chakravartty & Roy, 2017). Citra publik Narendra Modi sebagai pemimpin yang tegas, karismatik, dan anti korupsi sebagian besar dibentuk melalui penampilan media yang dikurasi, iklan-iklan politik, dan kampanye sosial (Schroeder, 2018).

Media televisi dan cetak memainkan peran sentral dalam kebangkitan Modi, terutama dalam pemilu nasional 2014 ketika BJP banyak berinvestasi dalam *branding* dan periklanan. Modi sering digambarkan sebagai “*vikas purush*” atau pria pembangunan yang memposisikannya sebagai seorang reformis, panggilan tersebut turut mengaburkan citra masa lalunya yang kontroversial terkait kerusuhan Gujarat pada tahun 2002 (Bobbio, 2012). Studi menunjukkan bahwa media arus utama di India berperan dalam memperkuat narasi pembangunan Modi sambil meminggirkan suara-suara yang berbeda dan kritik dari pihak oposisi (Udapa, 2015). Perusahaan-perusahaan media di India yang juga semakin selaras dengan kepentingan korporasi menyebabkan sedikitnya kritik atas kontradiksi dalam kebijakan-kebijakan Modi, sehingga hubungan antara media dan kekuasaan politik di India turut melemahkan jurnalisme kritis (Chatterjee, 2019). Ruang digital bahkan lebih efektif bagi Modi dan BJP dalam berinteraksi langsung dengan publik. Penggunaan ekstensif Modi atas *Twitter*, *Facebook*, dan aplikasi-aplikasi sosial media pribadi lainnya mencerminkan pemanfaatan digital dalam menyebarkan kesan keterlibatan performatif yang emosional guna membangun kedekatan dengan para pemilih (Mukherjee, 2020).

Media sosial juga memungkinkan BJP untuk menargetkan pemilih secara

mikro dengan konten yang disesuaikan, termasuk poster, meme, video, hingga pesan singkat yang memperkuat narasi nasionalisme mayoritarian dan kebanggaan budaya Hindu (Sinha, 2019). Platform digital tidak hanya memungkinkan BJP menyebarkan narasi yang menguntungkan, tetapi juga memfasilitasi penyebaran misinformasi dan propaganda politik atas pihak oposisi, yakni Kongres India. Hal tersebut dirasa merusak deliberasi demokratis di India menurut para ahli (Sen, 2019). Aspek-aspek penting lainnya dari strategi media BJP adalah kontrol dan pembentukan wacana publik melalui media yang berafiliasi dengan pemerintah dan influencer yang mendukung rezim. Munculnya saluran berita pro-pemerintah dan penargetan sistematis terhadap jurnalis yang kritis terhadap pemerintahan India di bawah Modi dan BJP telah menciptakan apa yang disebut beberapa pengamat sebagai “penangkapan media” (Gurumurthy & Bhartur, 2020). Pemerintah menggunakan mekanisme hukum seperti UU hasutan dan kasus pencemaran nama baik untuk membungkam kritik, hingga mempersempit ruang bagi narasi yang berbeda (Thakurta, 2018). Pada saat yang sama, BJP membina ekosistem *influencer* digital kanan yang mempromosikan ideologi saffron dan secara agresif membungkam pandangan oposisi. Strategi dua jalur ini menghasilkan lanskap media yang mengaburkan batas antara jurnalisme, propaganda politik, dan pesan negara menjadi semakin kabur.

Dalam masa pemerintahannya, BJP berhasil menggabungkan media tradisional, dalam hal ini koran dan televisi, dengan sosial media digital. Dalam pemanfaatan media gabungan tersebut, BJP dan Modi kerap menunjukkan adanya polarisasi politik sebagai salah satu strategi dalam menjaring dukungan massa melalui kampanye media. Meskipun polarisasi telah diperdebatkan sejak lama dalam politik India, polarisasi politik kontemporer di India saat ini menunjukkan

adanya perbedaan yang besar di bawah Modi dan BJP (Neyazi, 2017). Pertama, terdapat perbedaan besar antara gagasan demokrasi sekuler—yang merayakan adanya keragaman dan demokrasi—dengan nasionalisme Hinduta—yang mendorong identitas tunggal dan nasionalisme budaya yang semakin mencolok. Kedua, polarisasi politik dalam konteks India saat ini diperburuk oleh adanya media digital, di mana suara-suara reaksioner menggunakan taktik intimidasi dalam membungkam dan meminggirkan suara-suara moderat (Neyazi, 2017). BJP di bawah Modi juga menggunakan teknik bercerita yang sering kali mencakup polarisasi, penyederhanaan, intensifikasi, sensasionalisasi, dan personalisasi yang turut menarik perhatian publik India (Stromback, 2008).

Selain itu, seiring berjalannya waktu, telah terjadi pergeseran dalam cara Perdana Menteri Narendra Modi dan BJP berurusan dengan media sebelum pemilihan umum 2014 dan setelah berhasil merebut kekuasaan. Sebelum pemilihan umum, Modi dan BJP menyesuaikan taktik politiknya dengan logika media untuk mendapatkan perhatian. Di mana saat Modi memanfaatkan media sosial secara luas sebagai bentuk disintermediasi dalam menghadapi media arus utama guna langsung menjangkau para pengikutnya, Modi tetap mengkurasi pesannya sedemikian rupa agar dapat diadaptasi ke berbagai jenis media dan menjangkau khalayak luas sekaligus para jurnalis (Neyazi, 2017). Kemudian, pasca pemilihan umum 2014, Modi semakin menggencarkan berbagai upaya dalam menarik perhatian massa, baik secara langsung maupun tidak langsung, Modi dan BJP meningkatkan pengendalian atas media guna membangun persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah, sambil terus menggunakan taktik menyesuaikan diri dengan logika media (Neyazi, 2017).

Metode kontrol media secara langsung terlihat jelas dengan kemunculan

Zee TV dan Republic TV, yang hanya mempromosikan sudut pandang BJP di saluran media mereka. Kebanyakan dari pembawa acara Zee TV dan Republic TV juga merupakan simpatisan BJP. Sementara itu, metode kontrol tidak langsung oleh BJP dan Modi dilakukan melalui intimidasi dengan menggunakan aparaturnegara, yang menyebabkan banyak kelompok media terpaksa harus mengikuti pemerintah dalam berbagai isu nasional dan kebijakan politik. Contoh intimidasi yang dilakukan oleh BJP adalah penggeledahan rumah Pranjoy Roy, pemilik NDTV—saluran yang dianggap anti-BJP— oleh *Central Bureau of Investigation* (CBI) India pada 5 Juni 2017 dengan tuduhan penipuan terhadap bank. Kasus tersebut menimbulkan banyak pertanyaan karena kesepakatan tersebut terjadi antara dua entitas swasta, sehingga sulit dipahami mengapa CBI ikut campur dalam kasus tersebut (Subramanian & Mohan, 2017). Alasan kasus tersebut semakin mencurigakan adalah karena 2 hari sebelum penggeledahan tersebut, juru bicara BJP, Sambit Patra diminta keluar dari acara NDTV yang dipandu oleh pembawa berita Nidhi Razdan usai Patra mengatakan bahwa NDTV memiliki agenda tertentu dan terafiliasi dengan Partai Kongres (Neyazi, 2017).

Kemudian, melalui kepentingan dan kemampuannya untuk sepenuhnya memanfaatkan apa yang ditawarkan oleh teknologi, BJP berhasil menunjukkan dominasinya di ruang media digital dengan membiarkan pasukan *troll* atau *buzzer* politiknya menekan perbedaan pendapat dan membungkam suara-suara yang berseberangan. Strategi yang digunakan oleh BJP dan para pengikutnya di ruang digital mencakup penyebaran gambar yang telah dimanipulasi dan berita-berita palsu guna menyebarkan propaganda politik mereka, serta melontarkan pelecehan secara daring untuk melawan kritik (Neyazi, 2017). Pasukan buzzer politik BJP juga terlihat dilindungi oleh pemerintah, melihat aktivitas daring mereka yang

ekstrem. Sebagai contoh, pada Juli 2015, Modi mengundang 150 pendukung media sosialnya, termasuk para pengguna Twitter yang aktif dalam menggunakan hinaan seksual dan menyerukan kekerasan terhadap pihak oposisi, ke kediaman resminya (Nayezi, 2017).

Lebih lanjut, BJP dan Modi tidak hanya memanfaatkan media sebagai alat dalam menyebarkan berita bohong dan propaganda mengenai Partai Kongres, namun juga dalam membentuk tiga narasi besar yang menjadi fokus politik BJP dari tahun 2014 hingga 2020, yakni untuk mengamplifikasi retorika anti-muslim, menyebarkan semangat nasionalisme hindu, dan membangun persona Modi. Para nasionalis Hindu mengamplifikasi dan melakukan sistematisasi atas tren kemarahan publik dan kekerasan kolektif sebagai cara yang dianggap sah dari ekspresi politik dan cara sah dalam menggunakan kekuasaan politik (Hansen, 2019). Persatuan kelompok Hindu terbentuk dengan cara menargetkan kelompok muslim yang dianggap sebagai “*others*”, dengan memanfaatkan baik media arus utama maupun media sosial (Pamela, 2021). Salah satu contohnya adalah kemunculan dari Giriraj Singh, seorang pemimpin daerah yang sekarang menjadi Menteri dalam kabinet Modi. Pada saat pemilihan umum tahun 2014, Giriraj menyatakan dalam pertemuan publik bahwa siapapun yang menentang Modi, maka tempatnya adalah di Pakistan, bukan di India (Das, 2014). Penggambaran bahwa India sejatinya merupakan bangsa Hindu tersebut ditujukan untuk meraih perhatian besar yang menonjol pada saat kekuasaan politik BJP telah tertanam kuat ke depannya.

Selain penggambaran tersebut, BJP dan para anggotanya memanfaatkan media dalam menyebarkan stigma atas para muslim. Salah satu contohnya adalah, pada bulan Desember 2014, Niranjana Jyoti, seorang “*sadhvi*” atau perempuan

suci yang juga merupakan seorang Menteri negara bagian untuk pengolahan makanan di bawah pemerintahan Modi, menyampaikan sebuah pernyataan dalam salah satu kampanyenya, bahwa pilihan yang harus dipilih dalam pemilu adalah antara memilih “*ramzaadon*” (putra Dewa Ram) atau *haraamzadon*, yang mana diartikan sebagai anak haram (The Indian Express, 2014). Meskipun setelahnya Jyoti ditegur secara keras atas kekerasan verbal yang dilakukannya dan dipaksa untuk meminta maaf di hadapan umum, sebuah tren kian berkembang melalui unggahan-unggahan serta cuitan-cuitan yang dibuat oleh pasukan *influencer* BJP (Pamela, 2021).

Kampanye-kampanye menentang Muslim yang diluncurkan oleh Sangh Parivar, seperti upaya untuk mengkonversi ulang agama seseorang (*ghar wapasi*) maupun upaya dalam mencegah para wanita Hindu dari menikahi laki-laki muslim (“*love jihad*”), dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa kampanye-kampanye tersebut tidak akan menghadapi penolakan dari pemerintah yang sedang berkuasa. Badan yang memainkan tugas utama dalam memproduksi konten-konten media adalah *Information Technology Cell* (IT Cell) milik BJP. Dibentuk pada tahun 2007, IT Cell mencapai pengaruhnya pada saat kampanye pemilu 2014 dan kian mengikutsertakan dirinya ke dalam ekosistem media di India. Segala informasi yang berasal dari IT Cell dan BJP tidak lagi melalui pengecekan fakta oleh para perusahaan media karena perusahaan-perusahaan tersebut bahkan para jurnalis yang memproses informasinya percaya bahwa informasi-informasi tersebut bertujuan untuk memperkuat posisi pemerintahan Modi dan BJP (Pamela, 2021). Sebuah seri tayangan eksklusif oleh Times Now yang diluncurkan pada Juni 2017 mengenai para pemuda Hindu di Kasargod Kerala yang melakukan konversi agama ke Muslim merupakan salah satu

contohnya. Reportase tersebut bahkan mengangkat mengenai harga yang ditawarkan untuk konversi agama tersebut yang mana pada akhirnya terbukti sebagai berita bohong (Pamela, 2021).

Kemudian, upaya untuk menyebarkan semangat nasionalisme hindu dilakukan melalui penggambaran muslim sebagai kelompok “*others*” melalui media, memanfaatkan narasi-narasi yang telah disebarkan terlebih dahulu oleh Savarkar sebagai “bapak Hindutva”. Di mana semangatnya bermula dari kebutuhan untuk mencoba dan mencari sebuah prinsip ideologi kesatuan Hindu. Kebutuhan tersebut kemudian berubah menjadi mencari dan mengorganisasi prinsip-prinsip persatuan yang dianggap eksternal dari Hinduisme, untuk kemudian mengasumsikan para kelompok eksternal tersebut sebagai musuh bersama umat Hindu (Vanaik, 2020). Pembingkaiian tersebut memiliki berbagai macam bentuk, bahkan dapat terbentuk melalui penyebaran rasa takut bahwa kepentingan budaya dan geopolitik India terancam oleh elemen-elemen muslim, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Ancaman terhadap India dari negara tetangga yang bermayoritas Muslim yakni Pakistan, telah menjadi tema tetap dalam narasi Hindutva yang diangkat oleh Modi dan BJP (Pamela, 2021). Cara Modi memanfaatkan dengan baik kemarahan publik terhadap Pakistan pasca serangan bunuh diri terhadap konvoi polisi India di Pulwama, Kashmir, pada pertengahan 2019 merupakan praktik nasionalisme populis. Adanya dampak negatif yang mungkin timbul terhadap prospek elektoral BJP dalam pemilu yang akan segera digelar, pemerintahan Modi mengerahkan angkatan udaranya untuk melakukan serangan udara ke wilayah Pakistan guna menghancurkan kamp militan di Balakot (Pamela, 2021).

Pelanggaran wilayah oleh suatu kekuatan nuklir ke wilayah kekuatan

nuklir lainnya memiliki implikasi yang sangat berbahaya bagi kawasan secara keseluruhan. Namun, komitmen media arus utama dalam melindungi kebijakan tersebut dan menggambarkan sebagai sebuah aksi yang memprioritaskan kepentingan nasional, membuat penyerangan tersebut luput dari kritik masyarakat. Bahkan, liputan-liputan media menggambarkan penyerangan tersebut dengan sebutan “tindakan tegas” yang justru memperkuat citra Modi sebagai sosok yang karismatik, kuat, dan pemimpin yang dapat menjamin keamanan negara (Pamela, 2021). Lebih lanjut, pasca serangan Pulwama dan serangan udara Balakot, Modi semakin mengeksploitasi dua kasus tersebut dalam kampanyenya selama pemilu 2019, dengan menyerukan pidato-pidato yang memiliki nada nasionalis maskulin. Modi mengklaim bahwa pemerintahannya adalah “*mard sarkar*” atau pemerintahan lelaki sejati. Gagasan maskulin dalam kampanyenya kemudian dipadukan dengan nuansa militeristik, tampak jelas dalam cara Pulwama digunakan secara terbuka untuk kepentingan partisan melalui frasa-frasa yang digunakan oleh Modi dalam kampanyenya, seperti:

“Bisakah suara pertamamu dipersembahkan bagi mereka yang melakukan serangan udara tersebut?”

Implikasi dalam pernyataan tersebut dianalisis oleh para ahli bahwa hanya suara untuk BJP yang akan melawan para musuh-musuh bersama negara tersebut.

Kemudian, pasca berkuasa kembali di tahun 2019, Modi dan BJP semakin mengeluarkan kebijakan-kebijakan hindu nasionalisme yang kontroversial seperti praktik talak tiga yang diikuti dengan pencabutan Pasal 370 yang menghapus status Jammu dan Kashmir pada awal Agustus. Kemudian, pada

bulan November di tahun yang sama, tanah tempat berdirinya Masjid Babri yang telah terlebih dahulu dihancurkan diserahkan oleh Modi dan BJP kepada umat Hindu melalui putusan Mahkamah Agung. Peran media semakin mencolok dalam periode yang penuh ketegangan kelompok tersebut, dengan adanya narasi dalam media arus utama yang kian mendukung bahkan memuji kebijakan-kebijakan tersebut (Pamela, 2021). Salah satu contohnya adalah respons media terhadap penaklukan dan pembelahan Kashmir, peliputan atas kasus tersebut terbagi dalam tiga kategori besar dan semuanya memiliki nada nasionalis. Pertama, bersifat perayaan, media melihat langkah pemerintah sebagai respons yang tepat terhadap serangan militan terhadap tentara India yang dikerahkan di Kashmir. Cara kedua, media mengklaim bahwa situasi Kashmir damai dan bahwa opini publik secara umum mendukung keputusan pemerintah India. Kategori ketiga, media lebih fokus dalam meliput laporan kontra yang menentang narasi-narasi resmi pemerintah, yang kemudian mereka bingkai sebagai “agen Pakistan” (Firstpost, 2018).

Kian bertolak belakang dengan menjamurnya liputan pro-pemerintah, keheningan media kerap terjadi mengenai apa yang sebenarnya terjadi di Lembah Kashmir. Kemarahan masyarakat Kashmir atas tindakan agresif Pemerintah India tidak mendapatkan ruang ekspresi publik karena sensor ketat yang diberlakukan di wilayah tersebut, wartawan lokal diancam, diawasi, dipukuli, diinterogasi, bahkan ditahan (Pamela, 2021). Opini publik di India, yang dibentuk oleh media, merayakan fakta bahwa wilayah yang sekarang masih di bawah status sengketa kini secara nyata berada di bawah kendali India. Kenyataan tersebut pun didukung dan dianggap sebagai kemenangan nasionalis yang melambangkan kekuasaan negara atas peta India, meskipun pemerintah India telah melanggar

komitmen untuk mempertahankan status otonomi khusus wilayah tersebut.

2.4. Dinamika Hubungan Luar Negeri India di Bawah Narendra Modi dan BJP

Setelah membedah lanskap domestik India di bawah kepemimpinan Modi dan BJP yang dipenuhi dengan eksklusivisme politik, nasionalisme Hindu, praktik *othering* terhadap komunitas muslim yang dianggap sebagai musuh bersama, dan kendali atas media massa sebagai alat hegemoni, bab ini akan memperluas fokus ke ranah kebijakan luar negeri India terhadap negara-negara tetangga seperti Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, dan Tiongkok. Dalam konteks pemerintahan Modi yang berakar pada ideologi Hindutva dan kecenderungan ultranasional sayap kanan, kebijakan luar negeri tidak hanya dimaknai sebagai urusan antar negara saja, melainkan juga menjadi perpanjangan dari kebijakan nasionalisme domestik yang ingin mempertegas identitas Hindu dan kekuasaan India di kawasan Asia Selatan dan sekitarnya. Hubungan dengan Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, dan Tiongkok dapat menunjukkan pola-pola yang mencerminkan bagaimana ideologi internal BJP memengaruhi sikap dan tindakan diplomatik India, yang sering kali terlihat konfrontatif, simbolis, dan militeristik, ketimbang kooperatif atau pragmatis.

2.4.1. Dinamika Hubungan Bilateral India dengan Pakistan

Hubungan antara India dan Pakistan sejak pemisahan pada tahun 1947 telah ditandai oleh siklus ketegangan, konflik bersenjata, dan upaya damai yang rapuh. Konflik pertama yang meletus pada 1947 hingga 1948 berkaitan dengan status wilayah Kashmir, yang menjadi inti pertikaian teritorial dan ideologis antara kedua negara. Ketegangan ini kembali memanas dalam Perang 1965 dan

Perang Kargil 1999, di mana masing-masing negara memperlihatkan kegagalan proses diplomatik dan peran militer dalam membentuk kebijakan luar negeri kedua negara. Dalam buku T.C.A. Raghavan *“The People Next Door: The Curious History of India’s Relations with Pakistan”*, Raghavan mencatat bahwa perang dan diplomasi antara India dan Pakistan sering kali berjalan berdampingan, namun tak pernah mencapai titik stabil yang tahan lama karena keduanya selalu saling mencurigai niat satu sama lain (Raghavan, 2017). Upaya damai seperti Lahore Declaration pada 1999 dan Agra Summit pada 2001 menunjukkan adanya kemauan dari para pemimpin tertentu, yakni Atal Bihari Vajpayee dan Pervez Musharraf, untuk menjembatani jurang perbedaan. Namun, insiden seperti serangan Parlemen India pada 2001 dan Mumbai 26/11 pada tahun 2008 menghancurkan momentum tersebut (Raghavan, 2017).

Perbandingan antara kepemimpinan India dan Pakistan yang kontras dalam gaya dan strategi selama dekade terakhir turut memengaruhi perbedaan dinamika di antara kedua negara tersebut. Di masa lalu, tokoh seperti Nehru dan Zulfikar Ali Bhutto masih membuka ruang diplomasi dengan retorika ideologis yang kuat, namun tetap mempertahankan saluran komunikasi. Contohnya adalah meskipun terdapat berbagai tantangan dalam hubungan antara India dan Pakistan di era pasca-kemerdekaan, dimana kedua negara tersebut baru saja berpisah dalam proses partisi yang disertai dengan kekerasan, Nehru berupaya untuk menjaga hubungan melalui perjanjian Liaquat-Nehru Pact atau Delhi Pact di tahun 1950 yang bertujuan untuk melindungi minoritas di kedua negara tersebut (Indian Ministry of External Affairs, 1950). Sebaliknya, dalam konteks kontemporer, pemerintahan Modi menandai pergeseran besar dengan mengadopsi pendekatan yang lebih militeristik dalam merespons Pakistan. Contohnya, pasca

serangan Pulwama 2019, India meluncurkan serangan udara ke Balakot sebagai bentuk tindakan represif yang agresif, mengubah paradigma respons India dari defensif ke ofensif. Modi secara terbuka membingkai tindakan ini sebagai wujud “*New India*” yang berani dan tidak akan menoleransi ancaman lintas batas (Raghavan, 2017; Kaura, 2019). Retorika seperti itu kian menguatkan citra militeristik yang secara simbolis turut memperkuat posisi Modi sebagai pemimpin nasionalis yang kuat di hadapan publik domestik.

Selain militerisasi kebijakan luar negeri, pendekatan BJP di bawah Modi juga menampilkan eksklusivisme politik yang mempertajam batas simbolik antara “*us*” dan “*others*”, khususnya dalam konteks hubungan dengan Pakistan. Wacana nasionalisme Hindu yang diusung BJP mempersempit ruang bagi diplomasi inklusif karena hubungan dengan Pakistan sering kali disubordinasikan dalam narasi konflik identitas dan pengkhianatan (Danziger, 2020). Sikap ini tercermin dalam penghapusan pasal 370 Jammu dan Kashmir di tahun 2019, yang tidak hanya memicu kemarahan di Pakistan tetapi juga memperdalam ketegangan bilateral karena langkah tersebut dipersepsikan sebagai upaya integrasi paksa yang disengketakan (Chari, 2020). Pendekatan ini mengukuhkan eksklusivisme Modi, di mana diplomasi dengan Pakistan tidak diposisikan dalam kerangka rasional pragmatis, tetapi lebih sebagai medan simbolis yang memperkuat citra politik domestik.

2.4.2. Dinamika Hubungan Bilateral India dengan Bangladesh

Hubungan bilateral antara India dan Bangladesh telah mengalami transformasi signifikan sejak 2009, terutama setelah Sheikh Hasina kembali menjabat sebagai Perdana Menteri Bangladesh. Delwar Hossain dalam artikelnya “*The Dynamics of Bangladesh-India Relations: From a Paradigm Shift to a*

Challenging Era?” mencatat bahwa periode ini sering disebut sebagai “zaman keemasan” hubungan kedua negara, ditandai dengan peningkatan kerja sama di berbagai bidang seperti keamanan, perdagangan, dan konektivitas regional. India dan Bangladesh menjalin kemitraan strategis yang mencakup penyelesaian sengketa perbatasan darat dan maritim, serta peningkatan kerja sama dalam pengelolaan sumber daya air dan energi. Namun, meskipun terdapat kemajuan, hubungan ini tidak lepas dari tantangan, termasuk isu imigrasi dan persepsi dominasi India dalam hubungan bilateral.

Pada awal hubungan bilateral India dan Bangladesh pasca kenaikan Modi memang terdapat semacam paradigma baru yang menjanjikan dalam hubungan bilateral kedua negara tersebut. Khususnya pada saat kunjungan Modi ke Dhaka pada tahun 2015 dan penyelesaian perjanjian pertukaran wilayah (*Land Boundary Agreement*) yang menjadi simbol kuat komitmen India untuk memperbaiki hubungan dengan tetangga di sebelah Timurnya. Namun, harapan era baru kerja sama positif tersebut mulai terguncang oleh wacana eksklusivisme Hindu dan kebijakan seperti Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan (CAA), yang dianggap diskriminatif terhadap Muslim, telah menimbulkan kekhawatiran di Bangladesh dan memengaruhi persepsi publik terhadap India. Selain CAA, kebijakan *National Register of Citizens* (NRC) di Assam juga membawa dampak langsung terhadap hubungan luar negeri India dan Bangladesh. Pemerintah di bawah Sheikh Hasina menyampaikan keprihatinan atas perlakuan terhadap minoritas Muslim dan Hindu Bengali di India, terutama karena CAA secara eksplisit mengecualikan Muslim sebagai kelompok penerima suaka, hal tersebut menimbulkan kekhawatiran besar mengenai diskriminasi sistemik terhadap warga negara Bangladesh yang bermigrasi atau memiliki koneksi sejarah dengan India

(Chakravarty, 2020).

2.4.3. Perubahan Hubungan India-Tiongkok Pasca Modi

Dalam memahami konteks penelitian ini, tentu perlu adanya penjabaran mengenai dinamika hubungan bilateral antara India dan Tiongkok sejak berada di bawah kepemimpinan Nehru hingga di masa modern di bawah BJP dan Modi. Pada era Jawaharlal Nehru, hubungan India-Tiongkok ditandai oleh semangat solidaritas Asia dan upaya membangun kerja sama damai, yang dikenal melalui slogan *Hindi-Chini Bhai-Bhai* atau “India dan Tiongkok bersaudara” (Liu, 2021). Dari sudut pandang Tiongkok, masa ini dipandang sebagai periode penting di mana kedua negara berupaya melupakan warisan kolonialisme dan mengembangkan solidaritas negara-negara Dunia Ketiga (Chen, 2019). Bagaimana tidak, India turut menjadi salah satu negara pertama yang mengakui Tiongkok pasca kemerdekaannya di tahun 1949 dan menjalin hubungan diplomatis sejak 1950. India menjadi negara non-sosialis kedua yang mengakui Tiongkok dan negara non-sosialis pertama yang membangun hubungan diplomatis dengan Tiongkok (Zhao, 2000).

Selanjutnya, hubungan baik antara India dan Tiongkok turut terlihat sepanjang periode Krisis Korea di tahun 1950 - 1953, dimana India di bawah Nehru mendukung dan membantu Tiongkok (Zhao, 2000). Sikap diplomatis Nehru kemudian lebih lanjut terlihat pada awal tahun 1950, saat Tiongkok mengambil alih kekuasaan atas Tibet melalui aksi militer. Karena, meskipun menghadapi tekanan keras dari media dan politisi di India, Nehru memilih untuk menghindari konfrontasi langsung dengan Tiongkok terkait isu tersebut dan menerima kedaulatan Tiongkok atas Tibet. Langkah tersebut menandai pendekatan diplomatik Nehru yang pragmatis dalam menjaga hubungan bilateral

yang harmonis (Wang, 2005). Puncak dari pendekatan tersebut tercermin pada bulan April 1954, ketika India dan Tiongkok menandatangani *Sino-Indian Agreement on Trade and Intercourse between the Tibet Region of China and India*. Melalui perjanjian tersebut, India secara resmi melepaskan semua hak ekstrateritorialnya di Tibet, yang sebelumnya diwarisi dari perjanjian-perjanjian kolonial Inggris dan mengakui Tibet sebagai wilayah otonom di bawah Republik Rakyat Tiongkok.

Kemudian, sejak tahun 1949, dalam isu Taiwan dan Goa, India dan Tiongkok saling mendukung satu sama lain. India secara tegas menyatakan bahwa Taiwan dan pulau-pulau kecil di sekitarnya adalah bagian dari Tiongkok. India secara konsisten menolak konsep “dua Tiongkok” dan tidak pernah memberikan pengakuan kepada pemerintahan Guomintang di Taiwan yang dipimpin oleh Chiang Kai-Shek. Di sisi lain, Tiongkok memberikan dukungannya terhadap hak India untuk membebaskan Goa, bahkan dengan kekuatan militer jika diperlukan (Quanyu, 2005). Bahkan, pada Agustus 1955, diadakan berbagai pertemuan di Beijing dan Shanghai untuk mendukung perjuangan India dalam merebut kembali Goa. Radio Beijing menyatakan bahwa upaya Lisbon untuk mempertahankan kekuasaan kolonialnya di Goa, Daman, dan Diu merupakan penghinaan yang tidak dapat ditoleransi terhadap rakyat Tiongkok, rakyat India, dan seluruh rakyat Asia. Enam tahun kemudian, ketika India merebut Goa dengan kekuatan militer, pemerintah Tiongkok menyatakan dukungan tegasnya terhadap tindakan India (Zhao, 2000). Dengan kerja sama, dukungan, dan kebijakan luar negeri yang saling berkaitan antara India dan Nehru, menunjukkan adanya sifat diplomatis dan bersahabat dalam kebijakan luar negeri India di bawah Nehru.

Namun, semangat solidaritas tersebut mulai memudar seiring pergeseran

kepemimpinan dan dinamika geopolitik global, karena, dalam beberapa dekade terakhir, hubungan antara India dan Tiongkok mengalami perubahan dramatis di bawah kepemimpinan Modi yang memiliki pendekatan lebih nasionalistik, hal tersebut turut berimplikasi langsung terhadap keamanan kawasan Asia Selatan. Transformasi hubungan India dan Tiongkok merupakan respons India terhadap kebangkitan Tiongkok di era kontemporer, dimana sejak Perang Dingin, keterlibatan Tiongkok di Asia Selatan semakin meningkat melalui bantuan ekonomi dan dukungan militer. Hal tersebut menjadi tantangan bagi dominasi tradisional India di kawasan tersebut (Kaura, 2018). Karena, pada dasarnya Asia Selatan memegang arti penting baik bagi India maupun Tiongkok, didorong oleh hubungan historis, budaya, dan ekonomi di antara delapan negara di kawasan tersebut yakni Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Asia Selatan menjadi kunci dalam *Belt Road Initiative* (BRI) Tiongkok dan menjadi jalan untuk dominasi ekonomi dan pengaruh strategis bagi India (Loc, 2023). Sehingga, investasi Tiongkok, terutama dalam Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan dan negara-negara tetangga India di kawasan Asia Selatan dirasa sebagai ancaman terhadap keamanan dan stabilitas regional oleh India. Karena, India memandang kawasan tersebut sebagai kunci dalam pembangunan tatanan bebas dan terbuka di Samudera Hindia-Pasifik, akan tetapi justru India harus menghadapi tantangan berupa ancaman keamanan dan sengketa wilayah akibat meningkatnya pengaruh Tiongkok.

Persaingan antara kedua negara ini semakin berlangsung dengan sengit, dengan masing-masing berusaha memperluas pengaruh di kawasan tersebut. Kompetisi militer antara Tiongkok dan India juga signifikan, dengan kedua negara memiliki kekuatan militer yang baik serta kapabilitas nuklir. Kedua negara

telah terlibat dalam berbagai ketegangan militer di sepanjang perbatasan yang disengketakan, seperti di Doklam, Bhutan pada 2018 dan di Lembah Galwan pada 2020. Rivalitas militer ini sebagian besar didorong oleh sengketa wilayah, terutama di Aksai Chin (Kaura, 2020). Lebih lanjut, transisi kekuatan antara India dan Tiongkok menjadi semakin kompleks mengingat keanggotaan kedua negara tersebut dalam berbagai kelompok berpengaruh di luar BRICS, seperti G20, SCO, dan ARF. Ironisnya, meskipun BRICS dipandang sebagai pesaing potensial bagi kekuatan Barat yang mapan, di dalam kelompok BRICS sendiri terdapat kompetisi dominasi antara India dan Tiongkok. Ketegangan politik antara keduanya juga dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri Tiongkok yang berusaha “mengelilingi” India dengan membangun “*String of Pearls*” dalam bentuk hubungan militer dan ekonomi dengan negara-negara di sekitar India (Hai Loc, 2021).

Strategi “*String of Pearls*” merupakan bagian penting dari ekspansi geopolitik Tiongkok di kawasan Samudra Hindia (Rosyidin, 2015). Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Booz Allen Hamilton dalam laporan kepada Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 2004. Implementasi strategi ini terlihat melalui pembangunan dan pengelolaan berbagai pelabuhan strategis, seperti di Hambantota (Sri Lanka), Gwadar (Pakistan), Kyaukpyu (Myanmar) dan beberapa lokasi di Maladewa dan Bangladesh. Pelabuhan Gwadar sendiri merupakan bagian dari Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan (CPEC) yang memberikan Tiongkok akses langsung ke Laut Arab, sehingga mengurangi ketergantungannya pada Selat Malaka (Loc, 2021). Inisiatif tersebut merupakan strategi yang bertujuan untuk mengatasi “*Malacca Dilemma*” di mana Tiongkok mengalami kekhawatiran terhadap potensi penyumbatan Selat Malaka oleh

kekuatan asing.

Dalam menanggapi strategi tersebut, India mengembangkan strategi tandingan yang disebut “*Necklace of Diamonds*”, yakni serangkaian kemitraan militer dan ekonomi dengan negara-negara di sekitar Tiongkok seperti Jepang, Vietnam, dan negara-negara di Afrika Timur. Negara-negara lain yang menjadi sasaran India dalam mencapai tujuan strategi “*Necklace of Diamonds*” adalah Indonesia, Singapura, Mongolia, beberapa negara Asia Selatan seperti Bangladesh dan Srilanka, serta Iran, Oman, Mauritius, dan juga Maladewa (Das, 2025). Selain strategi tersebut, India juga memperkuat kerja sama strategis melalui forum Quad yang terdiri dari Amerika Serikat, Jepang, dan Australia untuk memastikan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Lebih lanjut, perebutan kekuasaan antara dua rival yakni India dan Tiongkok semakin tercermin dalam hubungan kedua negara tersebut dengan Maladewa sebagai sebuah negara kepulauan kecil di Samudera Hindia. Kedua rival tersebut berusaha untuk mengintervensi Maladewa dalam bidang ekonomi maupun militer, puncaknya adalah ketika adanya laporan bahwa India menempatkan pasukan khususnya dalam siaga di pangkalan militer Maladewa. Merespons hal tersebut, Tiongkok mengancam akan mengambil tindakan untuk menghentikan intervensi India di Maladewa (Jun, 2019). Tiongkok kemudian benar-benar mengambil tindakan dengan mengirim armada angkatan lautnya yang terdiri atas sebelas kapal perang yang dipimpin oleh kapal serbu amfibi tipe 071 ke dalam Laut Andaman melalui Selat Sunda, yang kian memperkuat posisi Yameen sebagai mantan Presiden Maladewa untuk memperpanjang status darurat meskipun mendapat penolakan keras dari India (CPG, 2024). Dengan demikian, enam bulan pasca kebuntuan militer terkait wilayah sengketa Doklam di Bhutan, Tiongkok dan India kembali

saling mengawasi dengan penuh kewaspadaan, kali ini di Samudra Hindia. Konflik di Maladewa menjadi manifestasi nyata dari rivalitas strategis dua negara Asia ini, menegaskan bahwa kompetisi mereka kini meluas melampaui daratan hingga ke arena maritim yang strategis.

Tabel 2.1. Perbandingan antara Hubungan Luar Negeri India dan Tiongkok pada Era Nehru dan Modi

Aspek	Era Nehru (1947 - 1964)	Era Modi (2014 - Sekarang)
Pendekatan Diplomatik	Pendekatan idealistik dan solidaritas Asia melalui slogan Hindi-Chini Bhai-Bhai (Liu, 2021).	Pendekatan realistis dan strategis berbasis kepentingan nasional dan keamanan (Kaura, 2020).
Pengakuan & Hubungan Awal	India menjadi negara non-sosialis pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok (Zhao, 2000).	Hubungan didominasi oleh kewaspadaan strategis dan pertimbangan kekuatan regional (Hai Loc, 2023).
Sikap terhadap Tibet	Nehru menerima kedaulatan Tiongkok atas Tibet, meskipun menghadapi tekanan domestik (Hongyu, 1995).	India meningkatkan kewaspadaan militer terhadap kegiatan Tiongkok di wilayah perbatasan, termasuk Tibet (Kaura, 2020).
Dukungan Internasional	India dan Tiongkok saling mendukung di isu Taiwan dan Goa (Quanyu, 2005).	Terdapat kompetisi antara India dan Tiongkok dalam forum internasional seperti BRICS, G20, dan SCO (Hai Loc, 2023).
Isu Perbatasan & Keamanan	Minim konfrontasi terbuka hingga awal 1960-an, meskipun ketegangan mulai	Terjadi bentrokan militer seperti di Doklam (2017) dan Galwan (2020), menunjukkan adanya

Aspek	Era Nehru (1947 - 1964)	Era Modi (2014 - Sekarang)
	muncul (tidak dominan pada awal masa pemerintahan Nehru) (Hongyu, 1995).	peningkatan ketegangan di area perbatasan (Kaura, 2020).
Strategi Regional	Fokus pada solidaritas Dunia Ketiga dan dekolonisasi (Chen, 2019)	Tiongkok membangun <i>String of Pearls</i> , India merespons dengan strategi <i>Necklace of Diamonds</i> (Hai Loc, 2023).
Kerja Sama Ekonomi & Militer	Hubungan bersifat saling mendukung tanpa kompetisi strategis yang tajam (Quanyu, 2005).	Persaingan pengaruh di Asia Selatan melalui investasi dan kerja sama militer, seperti di Maladewa (Aggarwal, 2022).
Peran India di Asia Selatan	Posisi dominan India tidak banyak ditantang oleh Tiongkok secara langsung (Zhao, 2000).	Kebangkitan Tiongkok melalui <i>Belt Road Initiative</i> dan <i>China-Pakistan Economic Corridor</i> dianggap mengancam dominasi tradisional India di kawasan (Kaura, 2018; Hai Loc, 2023).

Sumber: Tabel diolah oleh penulis (2025) setelah merangkum beberapa sumber artikel yang menyoroti hubungan India dengan Tiongkok di bawah kepemimpinan Nehru dan Modi.

Dengan demikian, dinamika hubungan India-Tiongkok telah mengalami pergeseran signifikan dari era Nehru yang didominasi oleh idealisme solidaritas Asia dan pendekatan diplomatik yang bersahabat, menuju era Modi yang ditandai oleh pragmatisme strategis, rivalitas geopolitik, dan peningkatan ketegangan militer. Jika pada masa Nehru kerja sama bilateral dan dukungan terhadap kepentingan masing-masing negara menjadi fondasi hubungan, maka di bawah kepemimpinan BJP dan Modi, hubungan tersebut semakin kompleks karena

terpengaruh oleh kebangkitan Tiongkok, proyek-proyek strategis seperti *Belt Road Initiative* dan *China-Pakistan Economic Corridor*, serta strategi pengaruh regional seperti “*String of Pearls*” oleh Tiongkok dan “*Necklace of Diamonds*” sebagai respons oleh India. Kondisi tersebut menegaskan bahwa hubungan India-Tiongkok bukan semata-mata persoalan bilateral, melainkan mencerminkan dinamika kekuatan regional dan global yang terus berkembang, dengan implikasi besar terhadap stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

2.4.4. Konteks Hubungan Luar Negeri Terkini: Krisis Galwan dan Penolakan *Belt & Road Initiative* (BRI) oleh India

Perubahan relasi India-Tiongkok pasca 2014 tidak hanya bersumber dari kalkulasi kekuatan material, tetapi juga dipicu rangkaian krisis antara kedua negara tersebut yang semakin menegaskan persepsi “ancaman Tiongkok” di benak publik dan elit politik New Delhi. Dua peristiwa paling menentukan adalah bentrokan Lembah Galwan pada Juni 2020 dan penolakan sistematis India terhadap *Belt & Road Initiative* (BRI), terutama atas koridor *China Pakistan Economic Corridor* (CPEC) yang melintasi Kashmir. Kedua peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana isu kedaulatan wilayah dan proyek infrastruktur asing dijadikan tonggak mobilisasi nasionalisme sekaligus pembenaran sikap luar negeri yang semakin keras oleh India di bawah BJP dan Modi.

Khusus mengenai Galwan, sepanjang 2014 - 2019, Modi dan Xi Jinping sempat berupaya meredam gesekan perbatasan melalui dua pertemuan informal yakni Pertemuan Wuhan pada tahun 2018 dan Pertemuan Chennai pada tahun 2019, yang dipasarkan sebagai babak baru ‘*strategic partnership*’ pasca krisis Doklam 2017 (Reuters, 2019). Dialog rutin *The Working Mechanism for Consultation & Coordination* (WMCC) serta protokol *Confidence Building*

Measures (CBM) 1993/1996 menegaskan aturan “*no fire, no bomb*” di Line of Actual Control (LAC), sehingga insiden patroli biasanya hanya berhenti pada sikap saling mendorong dan adu argumen. Meskipun demikian, pada 15 Juni 2020, terdapat titik balik dramatis yang merubah hubungan keduanya di perbatasan LAC, yakni di Lembah Galwan. India pun mengumumkan terdapat 20 prajurit yang gugur, sementara Beijing, mengakui adanya empat korban yang tewas dari *People’s Liberation Army* (PLA), setahun setelah kejadian tersebut (Reuters, 2021). Kejadian tersebut merupakan kekerasan fatal pertama sejak 1975 yang kemudian memicu gelombang protes anti-Tiongkok dan mendesak pemerintah Modi untuk mengkaji ulang seluruh pendekatan dalam pengelolaan perbatasan.

Dalam hitungan minggu kemudian, Kementerian Teknologi Informasi India melarang 59 aplikasi Tiongkok (*TikTok*, *WeChat*, dll.) dengan alasan keamanan nasional, larangan ini kemudian semakin diperluas menjadi pelarangan atas 300-an aplikasi hingga 2021 (Reuters, 2021). Lebih lanjut, di Ladakh, India menambah satu divisi infanteri gunung, memperkuat lapangan udara Daulat Beg Oldi, dan secara de-facto mencabut pembatasan membawa senjata di LAC. Retorika resmi menggambarkan sikap ini sebagai “*New India*” yang tidak lagi bersabar menghadapi provokasi. Kemudian, meski 19 ronde dialog menghasilkan penarikan pasukan di Pangong Tso, Galwan, dan Hot Springs, laporan Carnegie pada Desember 2024 mencatat terdapat dua titik di Depsang dan Demchok yang memiliki jumlah personel bersenjata hampir dua kali lipat situasi pra-2020 (Chadha, 2024). Konstelasi ini menanamkan kewaspadaan permanen dan menurunkan ambang kepercayaan publik India, menjadikan Tiongkok rival strategis utama ketimbang mitra dagang pragmatis. Hal ini semakin didukung

dengan adanya data oleh Pew Research (2023) yang menunjukkan adanya tren skeptisisme masyarakat India terhadap Tiongkok yang meningkat, survei tersebut menunjukkan adanya peningkatan ketidakpercayaan dan ketidaksukaan masyarakat India terhadap Tiongkok menjadi 67%, meningkat 21% dari tahun 2019.

Selain krisis Galwan, perubahan arah hubungan luar negeri India dengan Tiongkok serta perebutan pengaruh antara dua kekuatan tersebut terlihat dalam konteks penolakan *Belt & Road Initiative* dan narasi kedaulatan yang selalu digaungkan oleh Modi dan BJP. Sejak forum BRI pertama di tahun 2017, India menolak bergabung, sikap tersebut kian diperteguh dalam forum ketiga di tahun 2023 ketika Juru Bicara Kementerian Luar Negeri India, Arindam Baghchi menegaskan bahwa proyek tersebut “tidak menghormati kedaulatan India” karena CPEC melintasi wilayah Kashmir (NDTV, 2023). Tidak seperti mitra Quad lainnya yang tetap mengirim delegasi pengamat, India memilih untuk memboikot penuh BRI sebagai sebuah sinyal politis. Selain itu, dalam Raisina Dialogue 2016, Menteri Luar Negeri India, Subrahmanyam Jaishankar menegaskan bahwa India mendukung konektivitas global yang transparan, inklusif, dan menghormati integritas teritorial negara-negara. Melalui pernyataan tersebut, India tidak hanya menolak BRI secara substantif, tetapi juga menyampaikan kekhawatiran terhadap agenda strategis tersembunyi Tiongkok di kawasan (Madan, 2016).

Lebih lanjut, pada Konferensi Tingkat Tinggi Quad di Tokyo pada tahun 2022, Modi kembali menekankan mengenai konsep ‘*principled connectivity*’, mendukung pembentukan Quad Infrastructure Coordination Group untuk menyediakan alternatif pembiayaan Indo-Pasifik guna membendung skema pembiayaan BRI (Biden White House Archives, 2022). Selain komentar oleh

Modi dan para elit politik BJP, think-tank India berhaluan BJP, Vivekananda International Foundation, juga rutin menerbitkan laporan mengenai ‘*debt-trap diplomacy*’ oleh Tiongkok terhadap Sri Lanka dan Maladewa. Dalam laporannya, think-tank tersebut seringkali menegaskan bahwa BRI merupakan ancaman finansial dan geopolitik. Media pro-pemerintah pun kemudian semakin menggemakan narasi ini dengan menyorot krisis utang Hambantota 2017 dan kebangkrutan Kolombo 2022 sebagai bukti bahaya Tiongkok.

Sehingga, sebagai kontra kebijakan, India menggagas strategi ‘*Necklace of Diamonds*’ yakni akses logistik di Duqm-Oman, Chabahar-Iran, Sabang-Indonesia, serta latihan Malabar dan kerja sama Quad untuk memproyeksi kekuatan laut di Samudera Hindia. Studi geo-strategis terbaru menyebut langkah ini sebagai ‘*counter-encirclement*’ atas strategi ‘*String of Pearls*’ Tiongkok (Mirza, 2022). Lebih lanjut, strategi ‘*Necklace of Diamonds*’ menunjukkan transformasi paradigma kebijakan luar negeri India dari pendekatan yang defensif menuju postur yang lebih asertif dan proaktif, yang juga mencerminkan pola pikir nasionalis yang dianut BJP. Tidak hanya sekadar upaya geopolitik, kebijakan ini juga membawa muatan simbolik terkait kedaulatan dan kekuatan nasional, yang menegaskan peran India sebagai kekuatan dominan yang tidak tunduk terhadap tekanan eksternal, terutama dari Tiongkok (Mirza, 2022). Strategi ini memperlihatkan bahwa politik luar negeri India di bawah Modi tidak hanya dipengaruhi oleh kalkulasi rasional strategis, tetapi juga oleh dimensi identitas dan persepsi nasional mengenai ancaman. Melalui strategi tersebut, India secara aktif menandai batas geopolitik dan ideologisnya terhadap Tiongkok, seraya membentuk narasi nasional bahwa India adalah aktor yang kuat yang mampu menjaga kedaulatannya di tengah ketegangan regional.

Dalam Bab 2, penulis telah memaparkan perkembangan politik domestik India yang menunjukkan pergeseran dari sistem politik pluralis menuju model pemerintahan yang lebih eksklusif di bawah dominasi BJP dan Modi. Melalui rekam jejak politik, sejarah ideologi Hindutva, serta pernyataan-pernyataan dan tindakan para anggota BJP, tampak narasi yang diusung BJP secara konsisten menonjolkan identitas mayoritas Hindu sebagai elemen sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sosok Modi pun memainkan peran penting khususnya dalam konsolidasi kekuatan partai melalui pendekatan komunikasi yang kuat, citra sebagai pemimpin rakyat akar rumput, serta strategi kampanye berbasis teknologi sosial media yang digabungkan dengan media arus utama berhasil memperluas dukungan publik secara signifikan dalam berbagai pemilihan umum. Selain aspek domestik, bab ini juga lebih lanjut menguraikan dinamika hubungan luar negeri India sejak pemerintahan Modi berlangsung. Hubungan dengan Pakistan dan Bangladesh ditandai oleh ketegangan, penyesuaian kebijakan, dan pendekatan bilateral yang fluktuatif, namun ditandai dengan sifat asertif Modi terhadap negara-negara tetangganya. Sementara itu, hubungan India-Tiongkok memiliki perubahan yang cukup signifikan di bawah kepemimpinan Modi jika dibandingkan dengan di bawah kepemimpinan Kongres di era Nehru, khususnya dengan adanya peningkatan tensi dan kompetisi pengaruh, terutama di kawasan Asia Selatan dan Samudra Hindia. Sikap India dalam menanggapi ekspansi Tiongkok di kawasan tersebut menunjukkan kecenderungan respons yang lebih tegas dan berbasis keamanan dan kepentingan nasional India. Data-data ini memberikan landasan empirik yang akan dianalisis lebih lanjut dalam bab selanjutnya.

